

RINGKASAN

Penelitian tentang kebijakan pengembangan sapi potong melalui Program Bantuan Sosial (Bansos) belum pernah dilakukan di Provinsi Gorontalo. Sementara informasi tentang permasalahan dalam penerapannya di lapangan sangat dibutuhkan sebagai input perbaikan kebijakan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis implementasi kebijakan, 2) merumuskan alternatif kebijakan, dan 3) menganalisis prioritas kebijakan pengembangan sapi potong melalui Program Bansos di Provinsi Gorontalo.

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, yaitu mulai Bulan Juni sampai November 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah institusi yang terkait dengan kebijakan pengembangan sapi potong. Sampelnya adalah bagian dari institusi terkait dan teknik sampling dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Data primer dikumpulkan melalui interviu berdasarkan panduan daftar pertanyaan dan kuesioner dilakukan dengan bantuan Skala Saaty. Responden yang dipilih adalah pimpinan pada sampel yang diteliti. Data sekunder dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dokumentasi terhadap dokumen kebijakan pengembangan ternak sapi potong. Data dianalisis dengan analisis preskriptif yang menekankan pada rekomendasi kebijakan, dan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dengan bantuan perangkat lunak komputer *Expert Choise* Versi 11.

Masalah yang menghambat pengembangan sapi potong melalui Program Bansos di Provinsi Gorontalo terkait dengan aspek sosial dan aspek ekonomi. Masalah yang terkait dengan aspek sosial, yaitu: 1) mentalitas dan motivasi kerja masyarakat peternak, 2) kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak, dan 3) intervensi kebijakan yang bersifat kepentingan politik. Masalah yang terkait dengan aspek ekonomi, meliputi: 1) kurangnya modal usaha keluarga peternak, 2) kurangnya anggaran pemerintah, dan 3) lemahnya dukungan lembaga pembiayaan atau perbankan.

Alternatif keputusan yang dapat diambil oleh para pengambil keputusan atau pelaku kebijakan sebagai input perbaikan pengembangan sapi potong, yaitu: 1) komitmen pemerintah daerah, 2) pendampingan dan pembinaan bagi kelompok peternak, 3) revitalisasi pembiayaan perbankan, dan 3) koordinasi stakeholder.

Kriteria masalah sosial mempunyai bobot nilai yang lebih tinggi (0.755) dibanding kriteria masalah ekonomi (0.245). Permasalahan yang terkait dengan aspek sosial mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengembangan sapi potong sehingga penyelesaian masalahnya harus lebih diprioritaskan oleh para pengambil keputusan.

Sintesis prioritas menunjukkan bahwa alternatif komitmen pemerintah mempunyai bobot nilai yang tertinggi (0.421), kemudian alternatif pendampingan peternak (0.204), alternatif koordinasi stakeholder (0.202), dan alternatif pembiayaan perbankan (0.173). Komitmen pemerintah menjadi prioritas utama dalam menangani permasalahan pengembangan sapi potong melalui Program Bansos dibanding alternatif yang lain.